INOVASI PEMBANGUNAN INKLUSIF PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA PROGRAM PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN BELAJAR DI ERA PANDEMI COVID-19

Dea Angkasa Putri Supardi
Universitas Muhammadiyah Cirebon
dea.angkasa.putri.supriyadi@umc.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic created multidimensional challenges for development, particularly in the education sector, where learning activities were disrupted by social restrictions. This situation required local governments to introduce innovative policies to ensure inclusive and sustainable educational services. This article aims to describe the inclusive development innovation implemented by the Cirebon City Government in expanding access to learning opportunities for primary school students during the COVID-19 pandemic. The discussion adopts a descriptive approach by reviewing government policies, inclusive development indicators, and educational program implementation throughout the pandemic. The findings indicate that the Cirebon City Government successfully implemented a pentahelix collaboration involving government institutions, the private sector, communities, media, and academia. This collaborative approach was realized through the implementation of distance learning, the development of e-learning platforms, the provision of internet data assistance, the utilization of digital media and local television for educational delivery, and the strengthening of parental and school committee involvement in supporting students' learning activities. The synergy among stakeholders enabled the continuity of educational services while expanding learning access during the pandemic. These findings suggest that the pentahelix collaboration model represents an effective strategy for promoting inclusive development, particularly in the education sector during times of crisis.

Keywords: inclusive development, pentahelix collaboration, government innovation, educational access, COVID-19, Cirebon City.

Abstrak

Pandemi COVID-19 memberikan dampak multidimensional terhadap pembangunan, termasuk pada sektor pendidikan yang mengalami gangguan akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi kebijakan yang mampu menjamin keberlanjutan layanan pendidikan secara inklusif. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan inovasi pembangunan inklusif yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam memperluas akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Pembahasan dilakukan melalui kajian deskriptif dengan menelaah berbagai kebijakan pemerintah, data pembangunan inklusif, serta implementasi program pendidikan selama masa pandemi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon berhasil mengembangkan strategi kolaborasi berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, media, dan akademisi. Implementasi kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pengembangan platform e-learning, pemberian bantuan kuota internet, pemanfaatan media digital dan televisi lokal sebagai sarana pembelajaran, serta penguatan peran orang tua dan komite sekolah dalam mendampingi proses belajar peserta didik. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut mampu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi masyarakat pada masa pandemi. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pembangunan inklusif, khususnya pada sektor pendidikan di tengah kondisi krisis.

Kata kunci: pembangunan inklusif; kolaborasi pentahelix; inovasi pemerintah; akses pendidikan; COVID-19; Kota Cirebon.

PENDAHULUAN

Menurut Bappenas, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dasarnya mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun ketimpangan memiliki tren yang cenderung stagnan. (Bappenas, 2022). Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Berbicara pembangunan inklusif, pasti tidak akan terlepas dari serentetan pertanyaan seperti: sudahkah pertumbuhan ekonomi bersifat

Pro-Poor, Pro-Job, Pro-Growth, dan Pro-Equity? Namun, pandemi covid-19 kemudian menimbulkan dampak multidimensional yang membuat pembangunan terganggu. Covid-19 telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. (Susilo et al., 2020).

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. (Susilo et al., 2020). Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Accute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* (Ren L et al., 2020). Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong et al., 2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus (Susilo et al., 2020).

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020). Pasien yang terkonfirmasi covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas (WHO, 2020). Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. (WHO, 2020).

Pada 27 Januari 2020, Kebijakan yang pertama dilakukan oleh Indonesia untuk menanggulangi kasus lonjakan Covid-19 adalah membatasi perjalanan dari provinsi Hubei – Cina yang merupakan pusat Covid-19. Indonesia pun mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menunjuk 100 rumah sakit umum dalam negeri sebagai Rumah Sakit Rujukan pada 3 Maret 2020. Sedangkan pada 8 Maret 2020, Indonesia meningkatkan jumlah Rumah Sakit Rujukan menjadi 227 sebagai respon dari jumlah pasien COVID-19 yang terus meningkat. Akan tetapi, upaya tersebut tidak dapat mengatasi permasalan pandemi covid-19, dikarenakan jumlah korban terus meningkat dengan cepat. (WHO, 2020).

METODOLOGI

Data terakhir dari situs Pikobar, total terkonfirmasi covid di Indonesia adalah sebanyak jiwa 6.093.917 jiwa dan salah satu provinsi terbanyak yang terpapar Covid-19 adalah Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 1.113.248 atau sebesar 18,3% warga Indonesia yang terpapar Covid-19 adalah warga Jawa Barat. Berikut adalah data Angka Kejadian Covid-19 di Jawa Barat hingga Tahun 2022.

Gambar 1. Angka Kejadian Covid-19 di Jawa Barat Tahun 2022
Sumber: Data Pikobar, 2022.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian khusus karena berdasarkan data dari situs Pikobar, Jawa barat merupakan Provinsi rentan pada masa- masa puncak pandemi di tahun 2021. Pemerintah kemudian mengklasterisasi kota dengan klaster warna, di antaranya: zona hijau (bagi kota yang sedikit jumlah terkonfirmasi corona), zona kuning (bagi kota yang cukup banyak jumlah terkonfirmasi corona), dan zona merah (bagi kota yang paling banyak terkonfirmasi corona). Pada saat puncak pandemi Covid-19 di Jawa Barat tahun 2021, Kota Cirebon merupakan satu-satunya kota yang termasuk ke dalam klaster zona merah. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini, puncak tertinggi Covid-19 adalah pada bulan Juli-Agustus 2021.

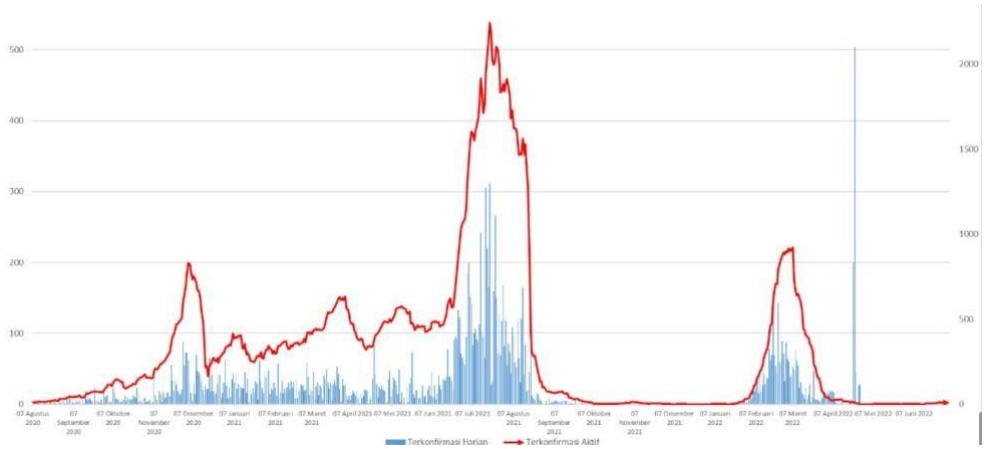

Gambar 2. Tren Kasus Harian Covid-19 di Kota Cirebon
Sumber: covid19.cirebonkota.go.id#about

Sebagai respon tingginya kasus Covid-19, berdasarkan laporan dari ABC news pada tanggal 7 maret 2020, puluhan negara menutup sekolah demi mencegah penyebaran virus. Setidaknya 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajarnya karena sekolah ditutup. Hal ini dilakukan untuk mencegah transmisi virus karena berdasarkan data di bawah ini, transmisi virus Covid-19 pada kelompok umur usia sekolah cukup tinggi dan menempati peringkat kedua, yakni sebesar 18% pada kelompok umur 6-19 tahun.

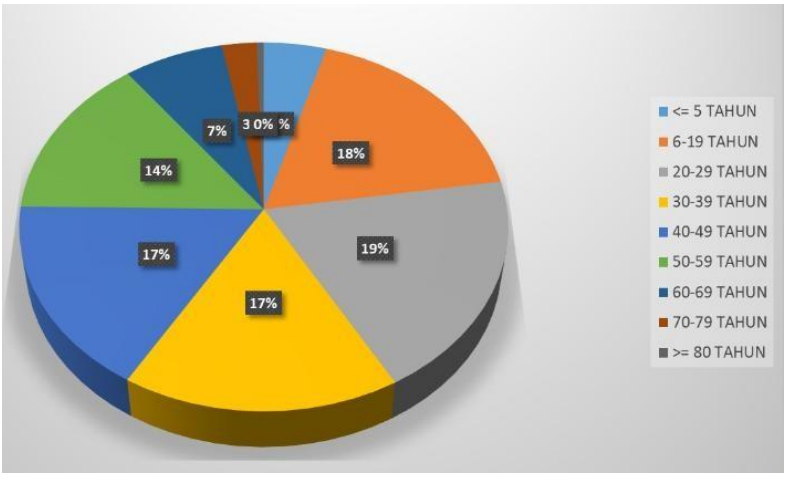

Gambar 3. Jumlah Data Covid-19 Kota Cirebon Berdasarkan Kelompok Umur
Sumber: Data https://covid19.cirebonkota.go.id.

Pandemi Covid-19 yang multidimensional ternyata juga berdampak juga pada kelompok usia sekolah dasar. Dalam membahas dampak pandemi pada anak WHO melihat dampak pandemi di enam aspek: (1) kemiskinan; (2) pembelajaran; (3) kesehatan; (4) kesehatan mental pengasuhan dan perlindungan anak; (5) gizi; dan (6) akses ke layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WHO, 2022). Untuk itu, dalam bahasan pembangunan inklusif di Kota Cirebon, penulis akan memfokuskan pada Program Perluasan Akses dan Kesempatan Belajar Kelompok Usia Sekolah Dasar di Era Pandemi Covid-19.

HASIL DAN DISKUSI

Pembangunan inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. (Bappenas, 2022). Pertumbuhan inklusif menurut UNDP didefinisikan sebagai proses dan hasil pertumbuhan dimana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan inklusif merepresentasikan pemerataan. Selain pemerataan, pertumbuhan inklusif juga menitikberatkan pada penekanan angka kemiskinan, hal ini sebagaimana pendapat Habito (2009) bahwa pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan GDP yang dapat menurunkan kemiskinan. Menurut Bappenas, ada tiga elemen dalam pembangunan ekonomi inklusif yang perlu diperhatikan, di antaranya: memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta memperluas akses dan kesempatan. Selain itu, ada tiga indeks pembangunan ekonomi inklusif, yakni:

1. Pilar I, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dengan Sub-Pilar: pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi;
2. Pilar II, Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan dengan Sub-Pilar: ketimpangan dan kemiskinan; dan
3. Pilar III, Perluasan Akses dan Kesempatan dengan Sub-Pilar:

kapabilitas, infrastuktur dasar, dan keuangan inklusif.

Adapun indikator pembangunan indeks pembangunan inklusif yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dapat dilihat dalam gambar bagan berikut:

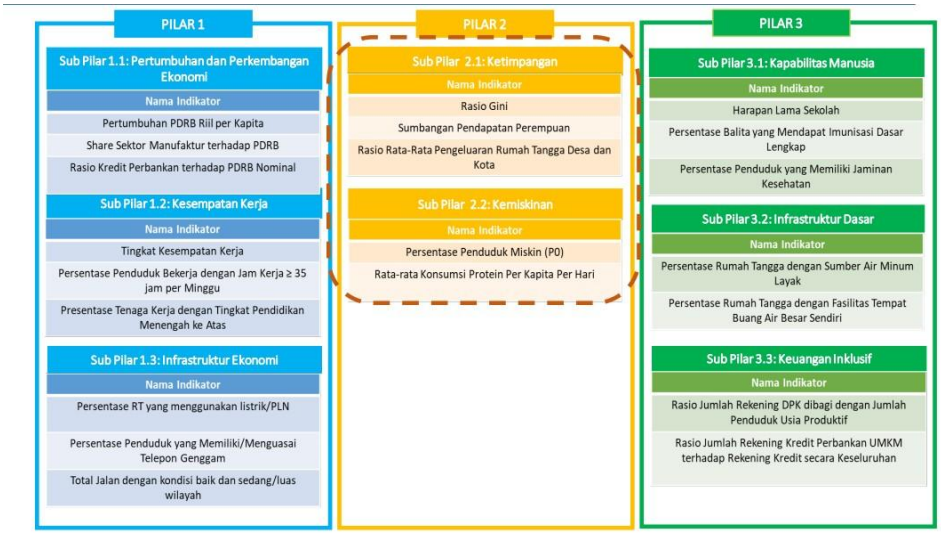

Gambar 4. Indikator Pembangunan Indeks Pembangunan Inklusif
Sumber: Bapenas, 2019.

Pembangunan inklusif di Kota Cirebon pada dasarnya menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data berikut, Kota Cirebon menduduki peringkat pertama di Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-14 secara nasional.

Kab/Kota	Indeks Inklusif	Indeks Pilar 1	Indeks Pilar 2	Indeks Pilar 3	Peringkat (dari 460)
Kota Cirebon	6.19	5.79	6.11	7.14	14
Kota Depok	6.09	5.91	6.63	5.96	21
Kota Bandung	6.02	5.84	6.38	6.06	28
Kota Banjar	5.96	5.27	6.25	7.30	37
Kota Sukabumi	5.93	5.47	6.10	6.77	43
Kota Cimahi	5.92	5.84	6.32	5.69	45
Bekasi	5.87	5.99	6.43	5.16	55
Kota Bogor	5.81	5.82	5.96	5.64	67
Kota Bekasi	5.80	5.90	6.41	5.09	68
Kota Tasikmalaya	5.79	5.45	6.22	6.08	72
Bandung	5.76	5.57	6.62	5.37	77
Karawang	5.71	5.63	6.41	5.25	84
Purwakarta	5.56	5.51	6.31	4.98	117
Indramayu	5.55	4.95	6.91	5.59	121
Sumedang	5.47	4.94	6.51	5.65	140
Bogor	5.46	5.39	6.15	4.98	143
Majalengka	5.45	4.84	6.59	5.72	152
Kuningan	5.40	4.68	6.69	5.81	167
Ciamis	5.25	4.60	6.56	5.48	228
Subang	5.25	4.76	6.74	4.97	230
Cirebon	5.20	4.89	6.61	4.64	254
Bandung Barat	5.14	5.11	6.21	4.29	279
Sukabumi	5.11	4.62	6.55	4.88	286
Tasikmalaya	5.04	4.48	6.45	4.97	309
Garut	5.03	4.55	6.26	4.92	314
Cianjur	4.99	4.53	6.33	4.78	331

Gambar 4. Indeks Pembangunan Inklusif Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Sumber: Data Bappenas, 2019.

Selanjutnya, bahasan penulis akan difokuskan pada Pilar III yang berdasarkan data di atas mendapatkan point tertinggi sebesar 7.14 artinya pembangunan di sektor manusia dirasakan memuaskan oleh masyarakat. Untuk itu, penulis akan memfokuskan tentang perluasan akses dan kesempatan dengan sub-pilar kapabilitas. Berdasarkan data dari Bappenas, Sebesar 60% penduduk di Jawa Barat tidak menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Kuintil 1 paling banyak, yaitu lebih dari 80%. Berdasarkan data BDT 2015, jumlah anak yang tidak bersekolah usia 16 – 18 tahun terbanyak berada di Bogor, Garut, Bandung dan Cianjur. (Bapenas, 2019). Namun, pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan Kota Cirebon selama masa pandemi dinilai cukup berhasil dalam melakukan upaya agar layanan pendidikan tetap berjalan. Terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan sebagai Kota Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah, penghargaan Raksa Prasada Katagori Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata, dan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (kota peduli terhadap anak dan perempuan). (fajarcirebon.com, 2022). Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menerapkan langkah pengentasan masyarakat dari covid-19 serta memberikan prinsip protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, cuci tangan/*hand sanitizer*, jaga jarak/hindari kerumunan, meningkatkan daya tahan tubuh, konsumsi gizi seimbang, kelola penyakit comorbid, memperhatikan kelompok rentan, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dalam menghadapi pandemi covid-19 (Buana D.R., 2020).

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Beskala Besar). PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease* (Covid-19). Beberapa hal yang dibatasi selama PSBB, diantaranya aktivitas sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta operasional transportasi umum (Kemenkes RI, 2020). Berikut adalah Data Harian Covid-19 sampai dengan Juni 2022.

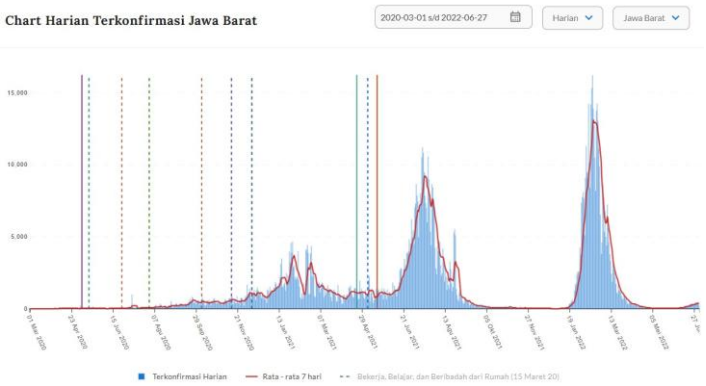

Gambar 4. Chart Harian Terkonfirmasi Covid 19 dan Informasi Program *Work from Home* dan *School from Home*

Sumber: Data Pikobar Jabar, 2022

Dengan tingginya kasus Covid-19 dan status zona merah di kota Cirebon pada tahun 2021, pemerintah Kota Cirebon menerbitkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2020. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *corona virus disease* 2019 (Covid-19) di wilayah kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil- Genap pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Kota Cirebon. Kajian dari Unicef menunjukkan setelah pandemi, anak dan remaja di Indonesia menghadapi tantangan 'kenormalan baru'. Pandemi memiliki dampak sekunder yang luas terhadap 80 juta anak Indonesia dan kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan jutaan anak dan remaja terganggu, akses layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan terdampak begitu besar. (UNICEF,2022). Pandemi covid-19 tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi pemerintah dalam menyalurkan layanan pendidikan kepada masyarakat usia sekolah dasar karena keterbatasan kemampuan anak usia SD yang belum berkembang sebagaimana orang dewasa.

Selanjutnya untuk mengatasi dan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 serta memberikan perluasan akses belajar bagi siswa sekolah dasar, pemerintah kota Cirebon membuat kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang merupakan solusi alternatif dari pemerintah kota Cirebon yang dalam hal ini Dinas Pendidikan menjadi *leading sector* dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. Namun, banyak tantangan dankendala yang dirasakan oleh siswa, guru, dan orang tua murid. Berdasarkan informasi dari Seminar Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), kesulitan banyak dirasakan terutama dalam hal akses internet, kelemahan tatap maya, inovasi guru sekolah, sampai pada aspek psikologis anak yang bersekolah di rumah.

Untuk mengatasi hal tersebut, berdasarkan telaah penulis selama masa pandemi tahun 2020 – 2021, Dinas Pendidikan Kota Cirebon melakukan inovasi kolaborasi pentahelix. *Jalinan pertama,* adalah pemerintah itu sendiri. Di awal pandemi pemerintah meliburkan selama 14 hari tanpa pembelajaran apapun dan diperpanjang pada termin kedua. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena pandemi berkepanjangan dan akan terjadi – yang menurut berbagai pakar pendidikan sebagai fenomena *loss gap generation.* Sehingga kemudian pemerintah membuat kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Jalinan kedua, adalah pihak swasta yang dalam hal ini penyedia layanan telekomunikasi dan IT membuat website e-learning khusus PJJ yang dananya didanai oleh Pemerintah Kota Cirebon namun pemanfaataannya diserahkan dan dikelola oleh masing- masing sekolah. Sekolah membuat jadwal khusus PJJ dimana materi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi whatsapp, zoom meeting, dan e-learning sekolah. Kebijakan sekolah pun bertahap, ketika puncak pandemi sekolah 100% daring, ketika pandemi mulai melandai dilakukan kebijakan 50% sekolah luring dengan membagi waktu sekolah untuk kelas rendah (kelas 1, 2, dan 3) sekolah pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan kelas atas (kelas 4, 5, dan 6) sekolah pada hari Selasa,

Kamis, dan Sabtu. Di kelas pun dibuat system shift dengan membagi menjadi dua kelas, yaitu kelas pagi dan siang sesuai dengan kelompok nomor presensi dari masing-masing siswa. Terakhir, ketika pandemi mulai melandai di awal tahun 2022, sekolah mulai 100% dengan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk ujian sekolah dibagi dua, yaitu: ujian melalui sekolah masing-masing dan ujian yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan melalui google form dengan membagi sekolah ke dalam 5 klaster, sesuai jumlah kecamtan di Kota Cirebon. Pemerintah juga bekerjasama dengan penyedia layanan *(provider)* telekomunikasi dengan memberikan kuota gratis bagi siswa yang terdaftar di sekolah Kota Cirebon.

Jalinan ketiga, adalah pelibatan unsur masyarakat yang dalam hal ini adalah orang tua dan komite sekolah. Peran orang tua sangatlah penting dalam pembelajaran di era pandemi khususnya bagi kelompok umur sekolah dasar. Sekolah melakukan komunikasi intensif dengan dibantu oleh komite sekolah dalam menyosialisasikan setiap kebijakan sekolah kepada seluruh orang tua murid. Rapat sosialisasi pun dilakukan melalui zoom meeting oleh sekolah masing- masing. Pendampingan anak belajar oleh orang tua selama pandemi memberikan dampak yang signifikan ketika mereka kembali masuk ke sekolah pada tahun 2022 dan mulai tatap muka 100% kembali.

Jalinan keempat, adalah pelibatan unsur media. Pemerintah kota Cirebon melakukan kolaborasi dengan stasiun televisi lokal untuk memberikan pemerataan pembelajaran bagi sekolah-sekolah di Kota Cirebon sehingga ketuntasan minimum di sekolah dapat tercapai meski situasi sedang dilanda pandemi.

Jalinan kelima, adalah pelibatan akademisi. Pemerintah Kota Cirebon bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Kota Cirebon untuk terus merumuskan formulasi terbaik dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada masyarakat kelompok umur sekolah dasar melalui berbagai diskusi, seminar, dan pelibatan dalam rekomendasi untuk pengambilan keputusan pemerintah Kota Cirebon.

KESIMPULAN

Kesuksesan kota Cirebon dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidak terlepas dari keterlibatan berbagai sektor non-pemerintah dalam inovasi pembangunan melalui kolaborasi *pentahelix.*

DAFTAR PUSTAKA

Amalina DH, Hutagaol MP & Asmara A. (2013). Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Volume 2 No 2. Hal 85 s.d 112.

Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. National Research Tomsk State University, Universitas Mercu Buana.

Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, Mahfud G., et al. (2020). Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. Progress in Disaster Science, 100091, 1-9.

Dyah Hapsari, S. A., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2018). Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, *2*(2), 85–112. https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.85-112

Dong Y, Mo X, Hu Y, et al. (2020). Epidemiology of Covid-19 Among Children in China. American Academy of Pediatrics, DOI: 10.1542/peds.2020- 0702

Dyah Hapsari et al., 2018. https://covid19.cirebonkota.go.id.

https://pikobar.jabarprov.go.id.

https://fajarcirebon.com/ditengah-pandemi-kota-cirebon-raih-sejumlah-penghargaan/

Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *4*(2), 240-252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118

World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general- s-opening- remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11- march-2020.

Susilo, A., Rumende, C. M., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O., & Yunihastuti, E. (2020). Corona Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, *Vol. 7*(1), 45–67. https://doi.org/10.25104/transla.v22i2.1682

Kementrian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 1-136. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020).

World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) Advice for the Public, (updated 10 May 2022). https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public.